BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada publik atau masyarakat umum. Laporan Keuangan adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dari kekayaan selama satu tahun anggaran. Dalam pemerintahan laporan keuangan juga digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan pemerintah. Bukan hanya pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menyusun pengelolaan keuangannya sendiri.

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi suatu keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap satu periode oleh BPK untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan mengenai hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2019 atas LKPD seluruh Indonesia Tahun 2018, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2018. Hasil pemeriksaan dari BPK mengungkapkan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintahan provinsi (94%), 327 dari 415 pemerintah kabupaten (79%) dan 84 dari 93 pemerintahan

kota (90%)(BPK RI 2019). Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah yang belum sesuai dan kelemahan pelaporan keuangan. BPK menemukan beberapa masalah terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan, yaitu: (1) pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, (2) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, (3) terlambat menyampaikan laporan, (4) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan (5) sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun begitu, masih terdapat permasalahan yakni pengelolaan aset tetap masih kurang memadai, pembayaran insentif pajak daerah tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan hibah kurang memadai dan aplikasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya bisa diandalkan (BPK Perwakilan Jawa Timur 2019). Dengan masih terdapat beberapa masalah maka perlu adanya suatu perbaikan terhadap permasalahan yang masih terjadi, sehingga bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). SAKD mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan secara sistematis

dimulai dari pengklarifikasian, penggolongan pencatatan dan pelaporan. SAKD yang bagus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, komitmen organisasi juga memepengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan komitmen pegawai untuk bertahan dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Andrianto, 2017). Pegawai yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang tinggi bisa menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Kemampuan dari pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pemahaman terhadap prinsip dan aturan tentu akan menghindarkan dari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kemajuan teknologi dengan berbagai kecanggihannya tentu menuntut semua instansi untuk memanfaatkan teknologi. Informasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, dengan ditunjang kemajuan teknologi maka dapat memudahkan memperoleh informasi. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dapat meningkatkan efektifitas dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan.

Faktor kelima yaitu Sistem Pengendalian Intern. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik akan menciptakan laporan keuangan sesuai peraturan yang ada dan menghindarkan dari penyimpangan.

Menurut Brendhi Septo Nugroho (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfataan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Ranny Hanaffi (2017) dengan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman SAP, Peran Internal Audit, dan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Elvin Andrianto (2017) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan SPIP terhadap Kualitas LKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai variable moderasi. Hasil penelitian Elvin menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan IT dan SPI pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan IT, dan SPIP terhadap Kualitas LKPD.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini penting agar dapat mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian diatas, peneliti mengambil judul **"Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah terdapat Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah terdapat Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini digunakan untuk:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Untuk Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama.
   b. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.
   b. Bagi peneliti, peneliti dapat mengimplementasikan apa yang telah peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memepermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat disusun sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penelitian Sebelumnya, Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti berikutnya.